

## DKPP Periksa Semua Pimpinan KPU karena Biarkan Gibran Daftar Cawapres

JAKARTA (IM) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa seluruh komisioner KPU RI, Jumat (22/12). Mereka diperiksa karena memproses pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, tanpa lebih dulu merevisi aturan pilpres.

Setidaknya ada 4 aduan terhadap seluruh komisioner KPU RI terkait perkara ini.

“Pengadu menduga bahwa tindakan para Teradu yang membiarkan Gibran Rakabuming Raka terus-menerus mengikuti tahapan pencalonan tersebut telah jelas-jelas melanggar prinsip berkepastian hukum,” kata Sekretaris DKPP David Yama dalam keterangan tertulis, Kamis (21/12).

Pada 25 Oktober 2023, KPU telah menerima berkas pendaftaran pencalonan Gibran. Padahal berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun.

Namun KPU berdalih, Putusan MK Nomor 90/

PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres sudah cukup untuk dijadikan dasar memproses pencalonan Wali Kota Solo berusia 36 tahun itu. Walau demikian, pada akhirnya, KPU mengubah persyaratan capres-cawapres, dengan merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Akan tetapi, revisi itu baru diteken pada 3 November 2023.

David mengatakan, sidang pemeriksaan Komisioner KPU terbuka untuk umum dengan agenda mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.

DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas David. ● han

## Pengusaha Alex Tirta Diperiksa Dewas KPK Soal Rumah Disewa Firlu

JAKARTA (IM) - Pengusaha Alex Tirta diperiksa Dewan Pengawasan (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (21/12). Ia ditanya soal rumah di Jalan Kertanegara, Jakarta, yang disewa Ketua KPK nonaktif, Firlu Bahuri.

Alex diperiksa oleh Dewas KPK sebagai saksi kasus dugaan pelanggaran etik Firlu Bahuri.

“(Ditanya) soal penyewaan rumah Kertanegara, cuma itu saja,” kata Alex kepada wartawan se usai diperiksa Dewas KPK, Kamis (21/12) siang.

Alex mengaku disodorkan 3-4 pertanyaan oleh Dewas KPK yang sifatnya mengonfirmasi soal rumah di Jalan Kertanegara tersebut.

Alex mengatakan, pertanyaan yang diajukan oleh Dewas KPK serupa dengan yang disodorkan oleh penyidik Kepolisian ketika ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Firlu Bahuri.

“Pertanyaannya sesuai dengan yang sebelumnya diperiksa di Bareskrim dan di Polda, cuma itu saja, jadi sama pertanyaannya,” katanya.

Seperti diketahui, Alex adalah orang yang menyewakan sebuah rumah di Jalan

Kertanegara, Jakarta Selatan, kepada Firlu. Belakangan, rumah tersebut diduga digunakan oleh Firlu sebagai safe house atau rumah aman dan menjadi tempat Firlu bertemu dengan pejabat.

Penyewaan rumah elite tersebut menjadi salah satu perkara dugaan pelanggaran etik Firlu Bahuri yang sedang diusul oleh Dewas KPK. Selain itu, Dewas KPK juga tengah mengungkap dugaan pelanggaran etik terkait pertemuan antara Firlu dan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta tidak jujur mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Dewas KPK telah memeriksa 12 saksi, antara lain, tiga pimpinan KPK yaitu Alexander Marwata, Nurul Ghufon, dan Nawawi Pomolango, serta eks Mentan Syahrul Yasin Limpo beserta ajudan dan sopirnya. Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, ada 27 orang yang masuk dalam daftar saksi kasus ini. Dewas KPK menargetkan persidangan kasus etik ini dapat rampung sebelum tahun baru 2024. ● han

## PN Jaksel Kabulkan Pencabutan Praperadilan Eddy Hiariej Vs KPK

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan pencabutan praperadilan mantan Wamenkumham Eddy Hiariej melawan KPK.

Diketahui, Eddy mengajukan praperadilan karena tidak diterima dijadikan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Gugatan praperadilan itu juga diajukan oleh Yogi Arie Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi.

“Mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan,” demikian bunyi putusan praperadilan yang diketok Estiono sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, Kamis (21/12).

“Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil,” ujarnya.

Sebelumnya, pengacara Eddy, Ricky Sitohang, mengatakan ada revisi dalam permohonan itu. Dia men-

gatakan pihaknya akan mengajukan kembali permohonan praperadilan setelah selesai melakukan revisi.

“Ada penambahan substansi, akan didaftarkan kembali,” kata Ricky.

Dalam permohonannya, Eddy meminta status tersangkanya dibatalkan.

“Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan para Pemohon sebagai tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis atau bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal,” kata pengacara Eddy, Muhammad Luthfe Hakim.

Sebagai informasi, Eddy ditetapkan sebagai tersangka bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Eddy dan Yogi Arie Rukmana selaku asisten pribadi Eddy. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM Mining) Helmut Hermawan. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PERNYATAAN AKHIR TAHUN LEMHANNAS

Plt. Gubernur Lemhannas Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah (ketiga kiri) memaparkan capaian Lemhannas dan rekomendasi terkait kondisi nasional saat ini dalam acara Pernyataan Akhir Tahun 2023 Lemhannas di Jakarta, Kamis (21/12/2023). Lemhannas telah menghasilkan 108 kajian untuk tahun 2023 yang meliputi lima fokus isu arahan presiden, yaitu penguatan demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan Ibu Kota Nusantara, serta berbagai isu strategis nasional, regional, dan internasional.

# Alexander Marwata: Saya Dengar Cerita Kapolda Metro Ancam Pimpinan KPK

Firlu dalam replik yang dibacakan di sidang praperadilan sebut Kapolda Metro mengancam pimpinan KPK jika menetapkan M Suryo jadi tersangka.

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pernah mendapatkan cerita soal adanya ancaman Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto kepada sejumlah pimpinan KPK. Ancaman itu terkait penanganan kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Cerita itu dari beberapa pimpinan lembaga antirasuah.

“Saya hanya mendengar cerita dari beberapa pimpinan begitu, benar atau tidaknya nanti yang bersangkutan sendiri,” kata Alex kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/12) kemarin.

Kendati demikian, Alex mengaku tidak pernah mendapatkan ancaman serupa. Alex pun mengaku belum mengetahui kebenaran soal cerita Kapolda Metro Jaya mengancam sejumlah

pimpinan lembaga antirasuah. “Hanya cerita. benar atau tidaknya tentu yang bersangkutan sendiri kan. Saya kan hanya testimoni de auditu,” ucapnya.

Seperti diketahui, Ketua KPN nonaktif, Firlu Bahuri, menggugat penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam replik atau tanggapan atas eksepsi Polda Metro Jaya selaku termohon, Firlu mengungkap penetapannya sebagai tersangka tidak murni sebagai upaya penegakan hukum.

Firlu menjelaskan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) pada 12 April 2023, yang melibatkan Dion Renato dan Bernard Hasibuan.

“Bahwa dalam perkara ke-3 tersangka sebagaimana tersebut di atas, diperoleh

bukti adanya penerimaan uang sleeping fee oleh Muhammad Suryo sebesar Rp11,2 miliar (untuk keamanan dan untuk Muhammad Suryo). Uang tersebut sudah dikirim melalui transfer ke rekening istri Muhammad Suryo sebesar Rp9,5 miliar,” ujarnya.

Saat itu, Irjen Karyoto melepon Direktur Penyidikan KPK. Dengan marah serta memberikan ancaman, apabila Suryo dijadikan tersangka maka akan ada pimpinan KPK yang akan menjadi tersangka juga. Para penyidik juga diancam antara lain, Alfred Tilukay, Anwar Munajah, dan Allen Arthur.

Namun KPK tetap melakukan ekpose dan gelar perkara terkait perkembangan perkara menjadi lima klaster, termasuk di dalamnya ada nama Suryo bersama pihak lain sebagai penerima.

“Lagi-lagi Kapolda Metro Jaya mendatangi Nawawi Pomolango dan menyampaikan kata-kata, ‘Jangan menersangkakan Suryo. Kalau Suryo detersangkakan, maka Pak Ketua akan detersangkakan’. Hal ini disampaikan oleh Nawawi kepada Alex Marwata,” ujarnya.

KPK kemudian menggelar ekpose hasil fakta persidangan pada tanggal 11 oktober 2023 dengan hasil diperoleh fakta bahwa beberapa pihak perlu ditindaklanjuti dengan penyidikan salah satunya ke Muhammad Suryo.

“Bahwa, selain mengancam Nawawi, Kapolda Metro juga melakukan ancaman kepada Nurul Gufron agar jangan menetapkan Muhammad Suryo sebagai tersangka. Jika Suryo ditetapkan sebagai tersangka maka semua Pimpinan KPK RI akan ditetapkan sebagai tersangka semua,”

ujar Firlu.

Ucapan ancaman tersebut juga disampaikan kepada Johanis Tanak melalui telepon yang di-loudspeaker dan didengar oleh ajudan dan driver Johanis. Hal itu disampaikan Johanis kepada Alex.

“Sehingga dengan demikian, pada dasarnya penegakan hukum yang dilakukan oleh termohon bukan berdasarkan bukti tetapi untuk menyembunyikan dan melindungi Muhammad Suryo dkk agar tidak ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada perkara DJKA,” katanya. ● han

## Anies akan Wajibkan Perusahaan Berikan BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojek Online

SERANG (IM) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, akan mewajibkan perusahaan startup memberikan asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada mitra ojek online (ojol) mereka.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Diskusi Publik di Universitas Bina Bangsa (Uniba) Serang, Banten, Kamis (21/12). Menurutnya, pekerjaan ojol adalah pekerjaan sektor informal yang juga harus mendapat perlindungan.

“Jadi kita nanti siapkan regulasi yang mengharuskan ada BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengemudi Ojol di

seluruh Indonesia, sehingga ada jaminan ketika terjadi kecelakaan,” ujar Anies.

Ia mengatakan regulasi tersebut sudah dikerjakan di Jakarta. Anies menyebut di Jakarta banyak orang bekerja di sektor informasi seperti Ketua RT dan Ketua RW. Saat mereka bertugas, ada kemungkinan mengalami kecelakaan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Siapa yang bantu meringankan biayanya? Enggak ada,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan jaminan berupa BPJS Kesehatan. ● han

## Ganjar Pranowo: Belok Kiri atau Kanan, Kalau Melanggar Mesti Dibawa ke Pengadilan

JAKARTA (IM) - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo merasa, indikasi praktik-praktik Orde Baru (Orba) kembali muncul. Kebebasan berpendapat masyarakat terbelenggu.

Ganjar mengaku menerima kabar terkait ketidakadilan, perlakuan semena-mena, bahkan ancaman atau intimidasi terhadap kebebasan berpendapat.

Ganjar mengatakan hal ini ketika meresmikan Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia (BAKI) GAMA 03, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu (20/12) malam.

“Ada orang berdatangan menyampaikan sikap, diperiksa. Ada orang yang bersuara mengekspresikan pendapat, diperiksa. Rasarasanya ingatan kita tidak hilang. Orde baru runtuh karena situasi, kondisi seperti itu. Dan, mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Sayang, rasa-rasanya indikasi itu (kondisi seperti era Orde Baru) sekarang muncul kembali,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Kamis (21/12).

Ganjar menyebut, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dituliskan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara yang tunduk pada hukum atau rechtsstaat (konstitusional). Dan, NKRI bukan negara

kekuasaan, NKRI adalah negara hukum.

“Tentu saja, apa yang menjadi visi dalam konstitusi menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk mengawalinya. Maka, yang belok ke kiri atau ke kanan, melanggar konstitusi, mesti kita tegakkan, dan mesti diputus sesuai palu yang diberikan secara adil,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mengajak BAKI GAMA 03 untuk mengawal demokrasi, dan membantu rakyat yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak adil.

“Saatnya, hari ini, kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan ketika ketidakadilan mulai terjadi. Saya titip pesan, kawan-kawan dari BAKI GAMA 03 yang akan membuat hotline untuk membantu mereka yang dirugikan, yang diperlakukan tidak adil. Khusus mendukung Ganjar-Mahfud, tolong dibantu,” kata Ganjar. ● mei



FOTO: ANT

## APEL SIAGA KEMENKUMHAM GORONTALO

Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Gorontalo melakukan atraksi bongkar pasang senjata dengan mata tertutup pada apel siaga di halaman kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo di Kab. Bone Bolango, Gorontalo, Kamis (21/12). Seluruh jajaran UPT Pemasarakatan Kemenkumham Gorontalo menggelar apel siaga Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 serta deklarasi netralitas pada Pemilu 2024.

### PENGUMUMAN

Direksi PT Mitra Energi Agung (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk namun tidak terbatas kepada para kreditur Perseroan, bahwa Perseroan berencana akan melakukan transaksi pengalihan saham yang akan mengubah pengendalian dalam Perseroan (“Transaksi Perseroan”).

Para kreditur dan seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan tertulis sehubungan dengan Transaksi Perseroan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini disertai alasan dan bukti-bukti yang mendukung kepada Direksi Perseroan, dengan alamat:

PT Mitra Energi Agung

Graha Mitra Lt. 6, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21 Jakarta 12930

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Desember 2023

Direksi

PT Mitra Energi Agung

PENGUMUMAN  
Berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan tanggal 22 Desember 2023, Nomor: 89, dibuat dihadapan MCNKA ANTONUTRI, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, YAYASAN KALAM ONAIR, berkedudukan di Kota Jakarta Utara, telah dibubarkan dan bagi para Pihak yang berkepentingan harap menghubungi Likuidatur yaitu Bapak HILARION PRASETIO, lahir di Pontianak, pada tanggal 10 Oktober 1956, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Propinsi DKI Jakarta, Plentis Mulian Blok YA Nomor 3A, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 016, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, untuk menyelesaikan segala persoalan utang-piutang yang berkaitan dengan Perseroan terbatas diatas. Penjualan utang Piutang yang tidak diselesaikan kepada Likuidatur dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman dianggap selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidatur (UUP/Pasal 147 ayat 3).  
Demikian pengumuman ini disampaikan harap semua pihak menjadi maklum.  
Tangerang, 22 Desember 2023  
Tid  
Likuidatur